

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

**1. PETUGAS PERSIDANGAN**

Desk : 02  
Provinsi : Papua Tengah  
Pimpinan Sidang 1 : Direktur Regional III  
Pimpinan Sidang 2 : Direktur Politik dan Komunikasi  
Notulis Aplikasi : Dinda Ayu Trisnawati  
Notulis Offline: Widia Anggi Palupi  
Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapperida Provinsi Papua Tengah</li> <li>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah</li> <li>3. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah</li> <li>4. Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Tengah</li> <li>5. Dinas Pertanian dan Pangan Papua Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>2. Kementerian Pertanian</li> <li>3. Kementerian Kesehatan</li> <li>4. Kementerian Perindustrian</li> <li>5. Kementerian Ketenagakerjaan</li> <li>6. Drs. Pietrus Waine, S.H., M.H, Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua Perwakilan Provinsi Papua Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Transportasi</li> <li>2. Direktorat Pangan dan Pertanian</li> <li>3. Direktorat Sumber Daya Air</li> <li>4. Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>5. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat</li> <li>6. Direktorat Ketenagakerjaan</li> <li>7. Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> </ol>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

**2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN**

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
1	Pembangunan Air Baku Karadiri (Pusat Pemerintahan)	1	1	Unit	Kab. Nabire	Kementerian PUPR	<b>Diakomodir</b>  <b>Kesimpulan: Diakomodir dengan catatan</b> Sedang menunggu tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan  Tahun 2024, Pemda Fokus persiapan yang merupakan kewenangan Pemda (Kesiapan Lahan (lahan diubah statusnya menjadi non produksi, RKKPR))		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		16 - Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		FC - Program Ketahanan Sumber Daya Air	5040 – Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	RBS – Prasarana Jaringan Sumber Daya Air		001 - Prasarana air baku yang dibangun			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
<b>Bapperida Provinsi Papua Tengah:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mendukung pusat Kawasan pemerintahan</li> <li>- Hal ini sudah dibicarakan dengan BPIW Papua, dan siap membantu pembangunan air baku</li> </ul> <b>Dinas PUPR Papua Tengah:</b>		<b>Ditjen SDA, Kementerian PUPR:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk desain direncanakan tahun in, namun sumber pendanaan untuk ada tambahan anggaran. Namun belum ada kepastian tambahan anggaran. Sehingga belum dapat dipastikan tahun ini</li> <li>- Diusulakn untuk dilaksanakan tahun 2025</li> </ul>		<b>Dit. SDA, Bappenas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disarankan untuk</li> <li>- SBPI sudah keluar, masih dinamis dalam menentukan RO,</li> <li>- Info dari PUPR, DED masih dalam proses dan menunggu sumber tambahan anggaran</li> </ul>					

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Papua</li> <li>- Usulan ini tahun 2024 dapat dilaksanakan pekerjaan fisiknya</li> <li>- Untuk dokumen DED nya tahun ini Balai yang mengelola</li> <li>- Saat ini dokumen RC dilaksanakan oleh Balai, sehingga</li> </ul> <p><b>Bapperida Papua Tengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harapannya dapat terlaksana tahun ini</li> <li>- Sudah ada bahan detail terkait usulan ini (FS, Master Plan, Bisnis Plan, dan AMDAL)</li> <li>- Desain disiapkan oleh Kementerian (Balai)</li> <li>- Secara administrasi sudah diselesaikan</li> <li>- Perlu ada percepatan pembangunan Papua</li> <li>- Harapannya tahun ini terselesaikan</li> </ul> <p><b>Pimsid 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena ini bersifat <i>top-down</i>, perlu pembagian kewenangan yang jelas apa yang disiapkan dengan Pemda dan Pusat</li> </ul> <p><b>BP3OKP Papua Tengah:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direncanakan tahun ini, tetapi belum ada tambahan skema penganggaran</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Regional III, Bappenas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada 4 DOB, untuk Papua Tengah ada permasalahan penyesuaian lahan</li> </ul> <p><b>BPIW:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PJ Gubernur Bersama KL terkait</li> <li>- Kementerian PU mendukung pembangunan DOB, dengan catatan RC sudah sesuai</li> <li>- Kemungkinan 2024 dapat dilaksanakan</li> <li>- Tahun 2024 terutama untuk Kantor Pemerintahan (DOB), dengan catatan seluruh dokumen terpenuhi</li> <li>- Dari Cipta Karya ada pendampingan untuk membantu Pemda terkait kelengkapan administrasi</li> <li>- SBPI sedang berproses di Kementerian Keuangan</li> <li>- Terkial dengan teknis Master Plan dan FS oleh Ditjen Cipta Karya sudah finalisasi untuk pengadaan barang dan jasa. Meskipun masih ada kendala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari Bappenas, prinsipnya mendukung usulan ini. Tetapi pagunya sepertinya tidak tersedia</li> </ul>	<p>Kementerian PUPR menyiapkan dokumen rencana teknis, memprioritaskan kegiatan ini dalam usulan kegiatan tambahan anggaran</p>
--	--	--	--	--	---

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		- Papua Tengah sebagai DOB, harapannya pembangunan fisik dapat diprioritaskan		- SBPI untuk 2025, sedangkan 2024 usulan tambahan anggaran untuk DIPA 2024 - Usulan Tambahan Anggaran (ABT) sedang berproses di Kementerian Keuangan					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
2	Pembangunan dan Peningkatan jalan Enarotali-Sugapa-Illaga-Mulia	129	3,5	Km	Kab. Puncak Jaya Kab. Paniai Kab. Puncak Kab. Intan Jaya	Kementerian PUPR	<b>Diakomodir</b>  <b>Kesimpulan: Diakomodir</b> dengan catatan ada penyesuaian volume 3,5 km (4,7M)  Saat ini sudah ada penanganan ruas jalan. Perlu didukung dengan kondisivitas lokasi		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		GA – Program Infrastruktur Konektivitas	2409 – Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan	RBC – Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		003 – Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		<p><b>Bapperida Papua Tengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika menggunakan transportasi udara, inflasi tinggi. Dengan adanya transportasi darat dapat menurunkan angka inflasi</li> <li>- Harapannya dapat terselesaikan</li> </ul> <p><b>BP3OKP Papua Tengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aksesibilitas dan konektivitas diperlukan oleh masyarakat</li> <li>- Harapannya dapat terselesaikan</li> <li>- Konektivitas dari Paniai-Timika sudah dianggarkan tahun 2023, namun sampai sekarang belum ada penanganan (Wageto-Timika)</li> </ul>	<p><b>BPIW:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan hasil Rakortek, Enarotali-Ilaga sudah oke, tetapi karena daerah konflik perlu kepastian pembangunan jalan</li> </ul> <p><b>Bina Marga:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minggu lalu ada trilateral meeting, secara umum berkomitmen menyelesaikan jalan Trans Papua</li> <li>- Enarotali-Sugapa-Ilaga-Mulia, diprioritaskan. Namun, volume menyesuaikan</li> <li>- Sinak-Mulia 3,5 dengan total kebutuhan 21 km. Anggaran 3,5 km dengan alokasi 47M</li> </ul> <p><b>Pimsid 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isu-isu yang menjadi perhatian bersama, seperti keamanan</li> <li>- Masing-masing melaksanakan bagiannya</li> </ul>	<p><b>Dit. Transportasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedepan akan berproses rencana terkait visi misi kegiatan Presiden Terpilih</li> <li>- Untuk pagu saat ini sifatnya masih baseline</li> <li>- Saat ini sudah terakomodir, namun ruasnya perlu disesuaikan</li> <li>- Saat ini yang sudah prioritas Mulia-Sinak penanganan di 2025 (SBSSN). Sudah masuk list prioritas. Masih progress penetapan DPP</li> <li>- Pagu masih bergerak untuk trans Papua, sementara Enarotali-Sugapa-Ilia</li> </ul>	(keamanan) baik Pemda dan Pemerintah Pusat		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
3	Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi OAP	4.000	Menyesuaikan hasil <i>exercise</i> Rakonreg (dengan skema	Unit	Kab. Nabire Kab. Puncak Jaya Kab. Paniai Kab. Mimika	Kementerian PUPR	<b>Diakomodir</b>  <b>Kesimpulan:</b>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		BSPS) dan ketersediaan anggaran		Kab. Puncak Kab. Dogiyai Kab. Deiyai		<b>Diakomodir dengan catatan</b> penyesuaian Rakonreg (BSPS – peningkatan rumah layak huni) dan ketersediaan anggaran  Jika ada penambahan fiskal, pemda mengusulkan untuk 5 daerah Kabupaten terkait Pembangunan Rumah Layak Huni
<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
01 - Transformasi Sosial		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		03 - Perlindungan Sosial yang Adaptif		
<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>		<b>RO</b>	
IA – Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4978 – Penyediaan Akses Rumah Layak Huni		RBB – Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		002 - Penyediaan Rumah Khusus Reguler	
<b>Catatan dan Tanggapan</b>						
<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
<b>Dinas PUPR Papua Tengah:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada Rakor dengan PU</li> <li>- Data Sibaru di Kabupaten adalah data lama. Kabupaten sedang update data di Sibaru</li> <li>- Luas per unit tidak dibicarakan, karena usulan tipe 36. Dari Kementerian mungkin akan menyetujui karena sudah termasuk rumah sehat</li> <li>- Jumlah penerima</li> <li>- Status tanah, masyarakat yang memiliki lahan (jadi aman, karena bukan relokasi)</li> </ul>		<b>Ditjen Perumahan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada pembahasan saat Rakoirtenrenbang, dengan catatan apakah rumah khusus atau swadaya</li> <li>- Dengan tipe 36 (termasuk rumah khusus)</li> <li>- Usulan ini dapat diusulkan, karena sesuai dengan permen PU No 7/2022 (penerima masyarakat di 3T)</li> <li>- Untuk tipe rumah khusus rumah 36</li> </ul>		<b>Dit. Perkim:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyetujui pembangunan, perlu dipastikan kesiapan lahan serta sesuai dengan peruntukan wilayah</li> <li>- Diperlukan konfirmasi apakah usulan dibahas pada Rakonreg PUPR</li> <li>- Hasil exercise perlu konfirmasi ke Ditjen Perumahan</li> </ul>		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		<p><b>Bapperida Papua Tengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per kabupaten ditargetkan 500, ada 8 kabupaten. Sehingga volume 4.000 unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan di Krisna, masih 4000 unit. Perlu penyesuaian volume yang disesuaikan dengan pagu</li> <li>- Belum bisa mengalokasikan berapa unit. Saat Rakonreg, tetapi yang diusulkan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni</li> <li>- Untuk usulan ini belum ada exercise terbaru</li> </ul> <p><b>BPWI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomenklatur Rumah Tidak Layak Huni Dogiyai 726 unit, Mimika 248 unit, dan Deiyai 218 unit (dalam Konreg). Ini berupa rumah layak huni</li> <li>- Program-program tergantung pada</li> <li>- Perlu dipastikan usulan pembangunan rumah layak huni atau peningkatan rumah layak huni</li> </ul>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
4	Pembangunan Rumah Sakit	1	-	Unit	Kab. Nabire	Kementerian Kesehatan	Ditolak
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	Kesimpulan:

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

<b>rujukan Provinsi Papua tengah</b>	01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		01 - Kesehatan untuk Semua		<b>Ditolak</b> Alternatif: Pembangunan RS baru dapat dilakukan melalui APBD, untuk pengembangan ketersediaan sarpras dapat dilakukan melalui DAK Atau dapat dilakukan melalui Direktif Menteri dengan Koordinasi dari Dit. KGM dan BPP	
	<b>Program</b>		<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>			<b>RO</b>
	DG – Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		2051 – Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		RAB – Sarana Bidang Kesehatan			001 - Pengembangan Fasilitas Rujukan Kawasan Indonesia Timur (Rujukan)
	<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
	<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>			<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
	<p><b>Bapperida Papua Tengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun lalu diminta untuk menyiapkan FS dan lahan oleh Kemenkes</li> <li>- Tahun lalu disarankan untuk DAK, tetapi tahun lalu DOB belum dapat mengusulkan</li> <li>- Pembicaraan lebih lanjut terkait RS eksisting di Papua Tengah</li> </ul> <p><b>Dinas Kesehatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2023 sudah diusulkan</li> <li>- Tahun 2024 sudah disiapkan FS, lahan (akan diselesaikan di bulan Juli pembayarannya), master plan akan selesai di bulan Juli, DED akan selesai di bulan Juli</li> <li>- Di Nabire hanya ada satu RS, dengan banyak keterbatasan</li> </ul>		<p><b>Pimsid 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RS menjadi kebutuhan bagi masyarakat, dan tentu memerlukan biaya yang lebih besar</li> </ul> <p><b>Pimsid 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan diarahkan menggunakan APBD, kemudian pengembangan dapat dilakukan melalui DAK</li> </ul> <p><b>Kementerian Kesehatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme melalui APBN tidak ada untuk usulan pembangunan RS baru,</li> </ul>			<p><b>Dit. KGM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2025 merupakan tahun transisi, sehingga kebijakan masa transisi</li> <li>- Pagu indikatif kemenkes sudah keluar, namun tidak beda jauh dengan anggaran tahun sebelumnya</li> <li>- Anggaran kemenkes tidak memungkinkan pembangunan dari nol</li> <li>- Pembangunan RS, jika dari APBN kemungkinan kecil. Kecuali ada mandatory dari Presiden dan/atau Menteri</li> <li>- Jika benar-benar akan dibangun dapat dibangun melalui APBD, lalu jika ingin peningkatan kapasitasnya dapat dilakukan</li> </ul>		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		<p>fasilitas, tenaga kerja, tata kelola, dllnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua tahapan sudah dilakukan berdasarkan proses. Harapannya RS dapat diakomodir, yang betul-betul representatif</li> <li>- Semua kasus saat ini masih di rujuk ke Jayapura</li> <li>- Sudah memiliki MP, ketika RS dibangun 2025 maka direncanakan 2026 sudah mulai beroperasi</li> <li>- DOB dirancangan RIPP adalah Papua Sehat, sebagai prioritas utama</li> <li>- Dinkes siap untuk menyelesaikan administrasi</li> <li>- Di Jayapura ada RS Rujukan (Abipura) □ Kementerian Kesehatan</li> <li>- Harapannya da pertimbangan lain, agar usulan ini dapat diakomodir agar Papua Sehat terwujud di Papua Tengah</li> <li>- RS Rujukan baru ada di tahun 2029. Tahun 2027 belum ada, dan tahun 2028 akan mengusulkan?</li> </ul> <p><b>BP3OKP Papua Tengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabupaten lain akses fasilitas kesehatan (RS) di Nabire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme lain dapat ditempuh, namun sampai tahun 2027 (kanker, jantung, stroke)</li> </ul> <p><b>Kementerian Kesehatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk usulan ini, saat ini belum ada penggunaan APBN</li> <li>- Untuk usulan pembangunan sarpras RS melalui DAK. Untuk menunya saat ini masih dalam proses</li> </ul>	<p>melalui KJSU. Sarpras dapat dilakukan melalui DAK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DAK 2025 sedang proses diskusi</li> <li>- Provinsi Papua Tengah (Nabire), sudah ada RS eksisting. Jika ada kebutuhan dukungan dapat disampaikan dukungannya ke Dit. KGM maupun Kemenkes</li> <li>- Untuk tahun 2025, belum memungkinkan melalui Belanja K/L</li> <li>- Jika ada usulan pembangunan RS melalui Belanja K/L biasanya mandatory langsung dari Presiden/Menteri</li> <li>- Jika ingin memperkuat RS Nabire (eksisting) memungkinkan dilakukan melalui DAK</li> <li>- Diatas 200 M per satu RS sangat jarang</li> <li>- Alternatif lain dapat melalui pinjaman/hibah</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
5	<b>Pembangunan BALAI LATIHAN KERJA (BLK)</b>	1	1	Unit	Kab. Nabire	Kementerian Ketenagakerjaan	<p style="text-align: center;"><b>Diakomodir</b></p> <p><b>Kesimpulan: Diakomodir dengan catatan</b> Dengan catatan lahan sudah <i>clear</i> dan data dukung serta dokumen sudah lengkap</p> <p>Perubahan bentuk bantuan berupa peralatan dan penyediaan infrastruktur</p>		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>			<b>RO</b>	
		DL – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2217 – Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelatihan Kelembagaan Vokasi dan Produktivitas		QEI – Bantuan Lembaga			004 - Bantuan Peralatan Lembaga Pelatihan Kerja UPTD-INPRES 9 2020	
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		<p><b>Bapperida Papua Tengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk tahun ini sudah ada penganggaran</li> <li>- Lahan tidak bermasalah</li> <li>- Dinas Ketenagakerjaan sudah ada komunikasi dengan Kementerian terkait BLK</li> <li>- Status lahan dan dukungan provinsi sudah dilaksanakan (tahun 2024)</li> </ul>		<p><b>Pimsid 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harap perlu diperhatikan untuk pelatihan pertanian (kopi)</li> </ul> <p><b>Kementerian Tenaga Kerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait pelatihan akan disesuaikan dengan anggaran Kemenaker yang diterima 2025</li> <li>- Usulan pengadaan peralatan dapat diusulkan melalui Proposal melalui Direktorat Bina</li> </ul>		<p><b>Dit. Ketenagakerjaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung usulan ini dengan catatan lengkap dokumen (DED, RC)</li> <li>- Pembangunan 1 BLK dalam 1 Provinsi</li> <li>- Dari 4 DOB, belum ada sama sekali BLK, ada cikal bakal penyiapan untuk membangun BLK</li> </ul>			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan gedung di Kab. Nabire (karena akses darat ke Nabire lebih mudah)</li> <li>- PT. Freeport ada hanya saja untuk Kab. Mimika</li> </ul> <p><b>Dinas Ketenagakerjaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinsi sudah memberikan dukungan dokumen</li> <li>- Diagendakan tahun 2024</li> <li>- Guru dan fasilitas pendukung nanti akan meminta dukungan dari pusat</li> <li>- Pelatihan yang akan dilakukan APBD provinsi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mengirim pelatihan-pelatihan jasa yang dibutuhkan</li> <li>- Pelatihan yang direncanakan adalah keterampilan otomotif, las, menjahit, dan sektor kelapa sawit. Sambil menunggu operasi dari BLK. Terkait pelatihan kopi juga akan dimasukkan</li> <li>- Pembangunan ini berjalan efektif, terkait kebijakan mengalokasikan penerimaan ASN/lainnya untuk instruktur di BLK</li> </ul>	Kelembagaan dan Pelatihan Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika belum terpenuhi harap dipertimbangkan alternative (swasta)</li> <li>- Menjadi kesempatan yang baik, modalitas yang disebutkan (UPTD milik pemda), apakah UPTD selamat DOB Papua Tengah sudah terlengkapi, untuk menambah alternative opsi tenaga kerja</li> </ul>			
No	Usulan	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan	
6	Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah	1	1	Kawasan	Kab. Nabire	Kementerian PUPR	Diakomodir	
<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>				
02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
<b>Program</b>		<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>				
IA – Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		4971 – Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	UBA – Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan				
<b>Catatan dan Tanggapan</b>								
<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>				
<b>Bapperida:</b> - Sudah ada surat dari Papua Tengah ke Kementerian PUPR terkait dengan RAB detail per gedung		-		<b>Dit. Perkim:</b> - Sudah dialokasikan oleh Cipta Karya (pembangunan Gedung DPRD, Gubernur, dan MRP) dan Penataan Kawasan pusat pemerintahannya - Alokasi anggaran sekitar 329 M untuk kawasan. Namun untuk per kantornya belum ada rincian (tetapi sudah dialokasikan)				

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
7	Perluasan lahan/optimalisasi Tanaman Pangan (Padi)	2.000	2.000	Ha	Kab. Nabire Kab. Mimika	Kementerian Pertanian	<b>Diakomodir</b>  <b>Kesimpulan:</b> <b>Diakomodir dengan catatan</b> usulan penambahan lokus dari Pemda di Kab. Mimika. Sehingga lokus berada di Kab. Nabire dan Kab. Mimika		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		HA – Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	4579 – Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	RAI – Sarana Pengembangan Kawasan		001 - Area penyaluran benih padi			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		<b>Dinas Pertanian Papua Tengah:</b> - Lokasi usulan ini di Kab. Nabire dan Kab. Mimika (yang dapat dikembangkan) - Umumnya kewenangan terkait padi dari pusat-ke provinsi		-		-			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

<b>8</b>	<b>Pengembangan Perkebunan Kopi Papua Tengah</b>	20.000	(Dibahas lebih lanjut)	Ha	Kab. Puncak Jaya Kab. Paniai Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya	Kementerian Pertanian	<b>Diakomodir</b>  <b>Kesimpulan: Diakomodir dengan catatan</b> lokus Kab. Dogiyai dan satuan rumah menjadi ha  Bila dapat ditambah lokus menjadi Dogiyai, Deiyai, dan Paniai dengan menyesuaikan pagu anggaran		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		EC – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5888 – Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	RAI – Sarana Prasarana Kawasan		006 - Kawasan Kopi			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
<b>Dinas Pertanian:</b> - Akan ditindaklanjuti dari pohon ke satuan ha dan akan dilakukan perbaikan sesuai arahan Kementan  <b>BP3OKP:</b> Kopi tidak hanya di Kab. Dogiyai, tetapi ada di Kab. Lain (Deiyai dan Paniai)		<b>Kementan:</b> - Usulan ini memang untuk sumber benih perkebunan, RO diganti ke Kawasan kopi - Satuannya harap dalam bentuk ha - Untuk kabupaten Dogiyai saja, karena ada keterbatasan pagu		<b>Dit. PP:</b> - RO sudah sesuai - Satuan masih dalam pohon seharusnya ha - RC harap dilengkapi - Dokumen KAK, ada 6 lokasi di Krisna ada 5. Di hasil Rakortekrenbang hanya Dogiyai yang diakomodir					
<b>No</b>	<b>Usulan</b>	<b>Volume</b>		<b>Satuan</b>	<b>Lokasi Kab/Kota</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan	
9	Pembangunan Sentra IKM Papua Tengah	2	2	Unit	Kab. Nabire	Kementerian Perindustrian	<p style="text-align: center;"><b>Ditolak</b></p> <p><b>Kesimpulan:</b> <b>Ditolak dengan catatan</b> diarahkan melalui DAK (DAK sentra IKM sedang dalam pembahasan)</p>	
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>		
		EC – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 – Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	RAH – Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		002 - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri agro		
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>						
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
		<p><b>Bapperida Papua Tengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan sudah ada di Nabire</li> <li>- Sepakat lewat DAK, dan harapannya dapat diakomodir melalui DAK</li> <li>- Peternak banyak tetapi dari segi pakan masih kurang. Sehingga IKM ini nanti diarahkan untuk peternakan</li> </ul>		-		<p><b>Dit. IPEK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait sentra IKM, bukan pembangunan sentra IKM tetapi lebih ke pengadaan mesin</li> <li>- Dapat dilakukan melalui mekanisme DAK (ful via DAK). Namun, saat ini DAK masih dalam proses pembahasan. Atau dapat melalui APBN Kementerian Perindustrian yaitu melalui Restrukturisasi, system reimburse sekitar 20-40%</li> </ul>		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika pemda ingin pembiayaan full dari Pemerintah Pusat maka diarahkan melalui DAK</li> <li>- Jika ingin sharing pembiayaan 20-40% dari pemerintah, maka mengajukan proposal kepada Kementerian Perindustrian</li> <li>- Untuk lokpri sedang berproses, dan masih menunggu Dit. PD</li> <li>- Dit. IPEK akan melakukan perangkungan jika ada tematik industri</li> </ul>		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
10	Peningkatan Jalan Primer dan Sekunder Pusat Pemerintahan Papua Tengah	18,98	18,98	Km	Kab. Nabire	Kementerian PUPR	<b>Diakomodir dengan catatan</b>	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		<b>Kesimpulan: Diakomodir dengan catatan</b>
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
		Program	Kegiatan		KRO		RO	anggaran sedang menunggu ketetapan anggaran dari Kementerian Keuangan
		GA – Program Infrastruktur Konektivitas	2409 – Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan		RBC – Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		023 – Dukungan Penanganan Jalan Daerah	
		Catatan dan Tanggapan						

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	
		<p><b>Bapperida Papua Tengah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data sudah lengkap</li> <li>- Geotagging sudah ada</li> <li>- Bentuk jalan berupa Burung Cenderawasih</li> <li>- Terkait data dan kesiapan lahan sudah selesai</li> <li>- Berada di Kawasan pusat pemerintahan</li> <li>- Jalannya adalah jalan kawasan di dalam pusat pemerintahan</li> <li>- Dari 300 ha sebesar 18,4 ha adalah hutan produksi yang harus dikonversi statusnya</li> <li>- Lokus Kawasan perkantoran berada dalam 1 kabupaten, jadi dokumen KKPR harus diterbitkan oleh Kab. Nabire atau Kementerian ATR</li> <li>- Harapannya perlu ada dukungan pembangunan gedung termasuk jalan di DOB</li> </ul> <p><b>Dinas PUPR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang diusulkan Zeni adalah untuk ruas Ilaga-Sinak</li> </ul>	<p><b>Kementerian PUPR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baik IJD ruas ini belum masuk, untuk ruas jalan DOB pun belum masuk</li> <li>- Usulan ini harapannya ada pembahasan lebih lanjut (bukan di desk Musrenbangnas)</li> <li>- Untuk dokumen DOB paralel dalam diskusi</li> <li>- Untuk clearingnya sudah, tetapi pembangunan belum dilaksanakan. Untuk tahun 2025 didorong terus untuk mulai dalam pembangunan fisik</li> <li>- Untuk Papua Tengah, masih didorong untuk KKPR. Detail per item masih menunggu dokumen KKPR</li> <li>- Hasil terakhir dari Wamendagri, statusnya seperti hal diatas (menunggu KKPR dan pembebasan lahan di 300 ha)</li> </ul> <p><b>Biro Perencanaan (BPAKLN), Kementerian PUPR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih perlu pembahasan jika akan diakomodir</li> <li>- Harus memastikan ruas ini kewenangan siapa</li> </ul>	<p><b>Dit. Transportasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum diketahui ruas jalan</li> <li>- Terkait IJD, yang menjadi kewenangan Daerah. Saat ini ada 3 ruas DPP, tapi masih proses review oleh Kementerian Keuangan (untuk tahun 2024)</li> <li>- Dari sisi daftar proyek prioritas sudah dilakukan</li> <li>- Perlu konfirmasi terkait ruasnya</li> <li>- IJD untuk ruas-ruas jalan kewenangan daerah</li> <li>- Fungsi jalan arteri, primer, sekunder kewenangan pusat. Jalan Daerah (kewenangan daerah (DAK, Inpres))</li> <li>- Jalan lingkungan pusat pemerintahan belum tau belum apakah secara fungsi menghubungkan pusat pemerintahan atau menghubungkan layanan dasar</li> <li>- Usulan-usulan pemda sudah dilakukan review (IJD)</li> <li>- Apakah bisa dilakukan melalui dana DOB? Karena IJD sudah selesai pengusulannya</li> </ul>	<p>Masih menunggu konfirmasi kewenangan pembangunan</p> <p>Prioritas karena sebagai bagian dari DOB</p> <p>Perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan terperinci antara Pemda dan Pemerintah Pusat (sebelum SBPA)</p>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika memang Direktif apakah sudah ada jika ditujukan langsung ke PUPR</li> <li>- Untuk DOB, yang dapat diakomodir dari Cipta Karya (CK) dan Perumahan (untuk mendukung pusat Kawasan pemerintahan)</li> <li>- Untuk jalan terkait dengan penanganan masih berproses di Kementerian Keuangan</li> <li>- Jika ada kebijakan tambahan anggaran dapat dilaksanakan oleh Bina Marga</li> </ul> <p><b>BPIW:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses jalan nasional kewenangan Bina Marga</li> <li>- Untuk akses jalan ini perlu konfirmasi</li> </ul> <p><b>Dit. Regional III, Bappenas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketika pembahasan DOB, apakah hanya membahas terkait pembangunan Gedung?</li> </ul> <p><b>BPIW:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan jalan termasuk akses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk anggaran dari APBN dan IJD ruas jalan ini belum dapat diakomodir</li> </ul> <p><b>Dit. Perkim:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu ada penjelasan peruntukan jalan</li> <li>- Butuh konfirmasi lebih lanjut dari Cipta Karya</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master plan belum ditandatangani</li> <li>- Sudah ada pembahasan tetapi belum ada pembagian (mana yang menjadi kewenangan siapa)</li> <li>- Penataan kawasan dilaksanakan oleh Cipta Karya, perlu ada integrasi ulang terkait jalan, air minum, dan persampahan</li> <li>- Usulan ini disarankan untuk pending</li> <li>- Usulan ini bukan kewenangan Bina Marga</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
11	Pembangunan Jalan Timika-Paniai	34.4	0	Km	Kab. Paniai Kab. Mimika	Kementerian PUPR	<b>Ditolak</b>  Kesimpulan: Usulan ditolak pada Forum Rakortekrenbang yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Februari 2024	
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro		
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>		
	GA – Program Infrastruktur Konektivitas	2409 – Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan		RBC – Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		003 – Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		Catatan dan Tanggapan					Kesimpulan Rakortek: Tidak direkomendasikan, dengan catatan jika ruas yang diusulkan masuk koridor Simpang Kapi Raya - Wagete dan Wagete - Timika, akan diusulkan melalui SBSN 2025. Usulan perlu diperbaiki
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		-	-	-			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
12	Pembangunan Jalan Lagari-Wapoga	55	0	Km	Kab. Nabire	Kementerian PUPR	<b>Ditolak</b>  Kesimpulan: Usulan ditolak pada Forum Rakortekrenbang yang
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		11 - Stabilitas Ekonomi Makro	
		Program	Kegiatan	KRO	RO		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		GA – Program Infrastruktur Konektivitas	2409 – Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan	RBC – Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	003 – Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	dilaksanakan pada Kamis, 29 Februari 2024		
<b>Catatan dan Tanggapan</b>						Kesimpulan Rakortek: Tahun 2025 belum direkomendasikan karena dokumen pendukung belum siap		
<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>				
-		-						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
13	Pembangunan Jalan Tmika-Potoaiburu-Yaur	334	0	Km	Kab. Nabire Kab. Mimika	Kementerian PUPR	<b>Ditolak</b>  Kesimpulan: Usulan ditolak pada Forum Rakortekrenbang yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Februari 2024  Kesimpulan Rakortek:	
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		11 - Stabilitas Ekonomi Makro		
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>		
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	RBC - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		003 - Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)		
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>						



**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		Catatan dan Tanggapan					Kesimpulan Rakortek: Tidak direkomendasikan, perlu didiskusikan lebih lanjut, karena belum masuk renjun, status jalan belum ada, dengan catatan perlu difasilitasi dan didiskusikan skala prioritas dan skema pendanaan lain
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		-	-	-			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
15	PEMBANGUNAN PLTA KALI SIRIWO DAN PLTA KALI WANGGAR	2	0	Unit	Kab. Nabire	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<b>Ditolak</b>  Kesimpulan: Usulan ditolak pada Forum Rakortekrenb
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		Program	Kegiatan	KRO	RO		
		JA - Program Energi dan Ketenagalistrikan	6353 - Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	004 - PLTMH		ang yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Februari 2024
<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		-		-		Kesimpulan Rakortek: PLTA tidak direkomendasikan, diarahkan menggunakan skema pendanaan lain, namun usulan perlu diubah menjadi PLTMH atau PLTS, kelengkapan dokumen dan kesiapan lahan perlu disiapkan	
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
16		1	0	Unit	Kab. Nabire	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<b>Ditolak</b>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

	Pembangunan PLTMH Kali Karadiri	<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		Kesimpulan: Usulan ditolak pada Forum Rakortekrenbang yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Februari 2024  Kesimpulan Rakortek: Tidak direkomendasikan, diarahkan menggunakan skema pendanaan lain, kelengkapan dokumen dan kesiapan lahan perlu disiapkan		
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		JA - Program Energi dan Ketenagalistrikan	6353 - Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi		QEG - Bantuan Peralatan / Sarana		004 - PLTMH			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>								
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>			<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
-					-					
<b>No</b>	<b>Usulan</b>	<b>Volume</b>		<b>Satuan</b>	<b>Lokasi Kab/Kota</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>	<b>Hasil Kesepakatan</b>			
		<b>Usulan</b>	<b>Kesepakatan</b>							

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

<b>17</b>	Pembangunan Dermaga Kapal Feri Wapoga dan Teluk Umar	2	0	Unit	Kab. Nabire	Kementerian Perhubungan	<b>Ditolak</b>  Kesimpulan: Usulan ditolak pada Forum Rakortekrenbang yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Februari 2024  Kesimpulan Rakortek: Tidak direkomendasikan, karena data dukung belum siap		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>				
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	4660 - Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	RBD - Prasarana Bidang Konektivitas Laut	017 - Lanjutan Pembangunan Faspel Moor				
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
-		-		-					
<b>No</b>	<b>Usulan</b>	<b>Volume</b>		<b>Satuan</b>	<b>Lokasi Kab/Kota</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>	<b>Hasil Kesepakatan</b>		
		<b>Usulan</b>	<b>Kesepakatan</b>						
<b>18</b>	pembangunan Jalan Topo - Lagari	47,6	0	Km	Kab. Nabire	Kementerian PUPR	<b>Ditolak</b>  Kesimpulan: Usulan ditolak pada Forum Rakortekrenbang yang dilaksanakan		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>				

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	RBC - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	003 - Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	pada Kamis, 29 Februari 2024
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>				Kesimpulan Rakortek: Tidak direkomendasikan, dengan catatan lingkaran luar belum jadi prioritas, masih berfokus pada lintas utara dari Nabire ke Jayapura, sehingga usulan ruas ini dialihkan ke skema pendanaan lain (perlu difasilitasi untuk mendiskusikan pendanaan lain)
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
			-	-		
	<b>Usulan</b>	<b>Volume</b>		<b>Satuan</b>		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

No	Usulan	Kesepakatan	Unit	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
<b>19</b>	pengadaan Kapal Roro Papua tengah	2	0	Unit	Kab. Nabire	Kementerian Perhubungan	<p><b>Ditolak</b></p> <p>Kesimpulan: Usulan ditolak pada Forum Rakortekrenbang yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Februari 2024</p> <p>Kesimpulan Rakortek: Tidak direkomendasikan, bisa diusulkan melalui DAK Transportasi Perairan, dengan catatan masih menunggu kebijakan DAK serta perlu disiapkan</p>	
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro		
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>		
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	4637 - Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	RAC - Sarana Bidang Konektivitas Darat		091 - Pengadaan Kapal Sri Menanti		
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>						
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
-		- -		- -				

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
20	Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan (PPI)	6	0	Unit	Kab. Nabire Kab. Mimika	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<b>Ditolak</b>  Kesimpulan: Usulan ditolak pada Forum Rakortekrenbang yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Februari 2024  Kesimpulan Rakortek: Tidak direkomendasikan dengan catatan Pelabuhan Pomako dan		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2338 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		001 - Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		-					Waharia termasuk kewenangan daerah, bisa diusulkan melalui DAK dengan catatan menunggu kebijakan DAK 2025.		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
21	Pembangunan Jalan Jogo-Yeretuar	94,3	0	Km	Kab. Nabire	Kementerian PUPR	<b>Ditolak</b>  Kesimpulan: Usulan ditolak pada Forum Rakortekrenbang yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Februari 2024  Kesimpulan Rakortek: Tidak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	RBC - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		023 - Dukungan Penanganan Jalan Daerah			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

		-	-		direkomendasikan karena masuk dalam koridor Wanggar-Kwatisore yang sudah ditangani dan ditargetkan selesai tahun 2024
--	--	---	---	--	---

**3. REKAPITULASI**

HASIL KESEPAKATAN	TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Diakomodir	8
Ditolak	13
Tidak Terbahas	0